

KATEKIS DAN PASTORAL POLITIK

Inosentius Mansur

"I prefer a Church which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a Church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security"

(Pope Fransiskus)

Abstract: The notion of politic from Fr. Ino takes account not only of the personal and inter-personal aspect of Christian faith but also of its public and "political" aspects. He is aware that to make an option for the poor that counts very much the pastoral shape and involvements of the Chatechists in the church. Spirituality and justice that shapes very much the model of the Chatechist in the church is an original and challenging contribution to the church as a whole. No animation in the church without advocacy. A chatechist in the church should stress the need for a transformation of society by "kingdom values", advocating and discussing an alternative approach to politic, economics and theology itself as well as an alternative model of the church. The author would like to stress that spirituality and justice very much linked to politics are topics of central concern to the church today. Politic for a chatechist in the church is seen as an articulation of a basic religious outlook or spirituality.

I. PENDAHULUAN

Adakah kaitan antara Katekis dan Politik? Apakah urgen bagi seorang Katekis untuk mengambil langkah pastoral dalam mengatasi problem sosial yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik? Inilah pertanyaan-pertanyaan awal yang boleh jadi mengkritisi dan bahkan menggugat judul tulisan ini. Tetapi bagaimana pun juga, tema tentang politik merupakan tema aktual sepanjang masa. Eksistensi manusia tak bisa dipikirkan tanpa politik. Alasannya, kebijakan sosial selalu berkaitan politik. Seorang pemimpin biasanya juga merupakan politisi yang datang dari partai politik. Karena itu kebijakannya acapkali dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Bahkan tidak jarang seorang pemimpin merupakan corong partainya, sehingga kebijakannya lebih banyak mengakomodir kehendak kolektif kroni-kroni politiknya daripada kehendak bersama. Parahnya, cita-cita untuk mencapai *common good* seringkali absen dari perhatian sang pemimpin.

Singkat kata, hegemoni politik amat kuat dalam menentukan arah kebijakan dan tidak jarang kebijakan itu kontra-publik.

Atas dasar ini, maka semua pihak dituntut untuk mencari solusi. Ada banyak solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Seorang politisi bisa memberikan kiat-kiat dari aspek politis. Seorang rohaniwan dapat memberikan solusi berdasarkan basis pengetahuan dan kedudukannya sebagai tokoh agama terutama dari segi moral. Seorang rakyat jelata bisa menawarkan jalan keluar berdasarkan kenyataan yang dialaminya. Seorang Katekis bisa menawarkan seperangkat solusi berdasarkan latar belakang pengetahuan yang ia miliki. Artinya ia bisa mengkritisi kebijakan publik dari segi pastoral politik. Ia bisa mengeksplorasi kebijakan politis sesuai dengan *basic* ilmunya. Itu berarti, politik bukan hanya menjadi domainnya partai politik, para pemimpin dan orang-orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin. Semua orang dapat dan bahkan "harus terlibat" dalam politik entah yang berkaitan dengan tataran diskursus maupun pada tataran praksis. Semua orang, termasuk para katekis, bisa terlibat dalam politik sebab politik itu erat kaitannya dengan tindakan publik untuk mencapai kebaikan bersama.

Lalu timbul pertanyaan, di manakah peran para Katekis atau para tamatan STIPAS dalam bidang politik? Bukankah mereka bisa terlibat dalam menentukan kebijakan sosial-politik? Tesis dasar tulisan ini adalah "**Katekis dapat berperan lebih dan memiliki *power* dalam perpolitikan**". Karena itu, mereka dituntut untuk terlibat dan memberikan solusi pastoral dalam mengatasi problem sosial yang disebabkan oleh kebijakan politis yang salah kaprah.

II. KATEKIS DAN POLITIK: MENUJU RESTORASI PUBLIK

2.1. Katekis, Siapakah Dia?

Di sini tidak akan dijelaskan secara terperinci siapa itu Katekis, peran-peran apa yang seharusnya di jalankan dan bagaimana dia menjalankan perannya itu. Yang dipaparkan di sini hanyalah sekilas pemahaman tentang Katekis dan bagaimana mereka bisa berperan dalam dunia sosial politik. Apa yang akan diutarakan di sini berkaitan erat dengan tema peran politik seorang katekis.

Katekis adalah pengajar agama profesional di dalam Gereja Katolik. Disebut profesional karena mendapat bekal pendidikan formal dalam kateketik, mencari nafkah di bidang katekese, mempunyai etika profesi sebagai pengajar agama, dan mengembangkan diri melalui suatu asosiasi katekis. Katekis bekerja sebagai guru agama di sekolah maupun di Paroki. Pada umumnya Katekis adalah lulusan dari Sekolah Guru Agama (SGA) atau Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Agama, atau Akademi Kateketik atau Sekolah Tinggi Kateketik (STKat) pada masa lalu atau sekarang lulusan lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai konsentrasi keilmuan di bidang agama Katolik dan metode mengajar dalam kurikulumnya.¹

Spiritualitas Katekis berdasarkan pada iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Katekis perlu terbuka terhadap Sabda Tuhan, mempunyai keutuhan dan keaslian hidup, bersemangat missioner dan berdevosi kepada Bunda Maria. Itu artinya, hidup, tindakan dan karya Yesus Kristus menjadi contoh untuk seorang katekis.² Dengan demikian, eksistensi seorang Katekis amat penting. Dia memiliki otoritas mengajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran iman Katolik karena didukung dengan sejumlah pengetahuannya dalam bidang ini. Meminjam bahasa Paus Fransiskus, Katekis adalah "pilar" untuk pendidikan iman dan bahwa menjadi katekis harus "dimulai dengan Kristus."³

Semakin jelas bahwa posisi Katekis dalam kehidupan manusia pada umumnya amat penting dan karena penting, Katekis amat dibutuhkan oleh banyak pihak untuk menjadi garam dan terang bagi dunia (bdk. Mat. 4: 13-16). Karena itu, katekis mesti "berani" untuk masuk dan terlibat dalam gerakan politik yang berusaha untuk membendung berbagai distorsi sosial akibat degradasi publik.

2.2. Urgensitas Keterlibatan Katekis dalam Politik

2.2.1. Pastoral Politik Sebagai Imperatif Pastoral

Gereja Katolik mulai mengungkapkan sikapnya terhadap masalah-masalah sosial-kemasyarakatan ketika Bapa Suci Leo XIII menerbitkan

1 <http://id.wikipedia.org/wiki/Katekis>, diakses 17-03-2014

2 <http://stepanus-ardi.blogspot.com/2011/12/spiritualitas-seorang-katekis.html>, diakses 17-03-2014.

3 <http://www.penalndonesia.org/2013/paus-fransiskus-menyebut-katekis-sebagai-pilar-pendidikan-Iman>, diakses 20 Maret 2013.

ensiklik *Rerum Novarum*. 1 Mei 1981.⁴ Mulai saat itu, Gereja tidak lagi “apatis” terhadap berbagai problem sosial, tetapi senantiasa peka dan terlibat dalam usaha-usaha pastoral berdaya liberatif. Ada banyak dokumen yang menunjukkan perhatian Gereja. Salah satunya adalah Ajaran Sosial Gereja (ASG) khususnya dalam bagian yang berbicara tentang Paguyuban Politik. Menurut ASG, yang menjadi dasar dari adanya paguyuban partai politik adalah pribadi manusia. Pribadi manusia merupakan dasar dan tujuan tatanan dan kehidupan politik.⁵ Ketika pribadi manusia diletakkan sebagai matra utama dari partai politik, itu berarti partai politik mesti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebab “paguyuban politik lahir dari kodrat pribadi manusia”.⁶

Senada dengan apa yang telah digariskan oleh ASG ini, perjuangan manusia, terutama para Katekis dalam politik mesti mengerucut kepada penghargaan martabat manusia. Jika dalam kenyataannya, mencampakkan harkat dan martabat manusia, maka Katekis harus berjuang untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia itu, apa pun caranya. Ketika praktek perpolitikkan kita seringkali mengabaikan kepentingan manusia dan kebaikan bersama, maka para Katekis harus berani berjuang dan memperjuangkannya untuk tidak mengabaikan kepentingan bersama itu. Inilah adalah tugas, tetapi tugas ini merupakan perintah. Tugas pastoral politik seorang Katekis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus: *praedica verbum, opportune importune*, wartakanlah sabda, baik atau tidak baik waktunya (2 Tim. 4:2). Ini tidak berarti tugas dalam bidang politik melebihi tugas lainnya dan seolah-olah politik di atas segalanya. Keterlibatan dalam dunia sosial politik merupakan salah satu cara untuk memuliakan Allah Tritunggal. Sebab, “dalam Perjanjian Baru kita baca bahwa: Allah adalah kasih (1 Yoh. 4:8) dan perkembangan teologi Kristiani pada abad-abad pertama Kekristenan merumuskan inti iman Kristiani sebagai iman akan Allah Tritunggal”.⁷ Namun demikian, iman akan Allah Tritunggal itu mesti diaplikasikan dalam praksis hidup sosial-kemasyarakatan.

4 Eddy Kristiyanto (Ed), *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), p. 13

5 Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kopendium Ajaran Sosial Gereja* (Mauere: Ledalero, 2009), p. 264

6 *Ibid.*,

7 Georg Kirchberger “Berbagi: Inti Iman Kristiani, Tinjauan dalam Perspektif Teologi” dalam *Berbagi* Volume 1, No 1, Januari 2012, p.11.

2.2.2. Dari Basis Epistemis Menuju Keterlibatan Sosial

Secara epistemis, Katekis memang memiliki sejumlah pengetahuan terutama pengetahuan tentang agama dan teologi pastoral. Toh tak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama mereka kuliah adalah untuk mendapatkan pengetahuan khususnya pengetahuan dalam bidang agama dan Pastoral. Tetapi basis epistemis saja belumlah cukup. Akan menjadi efektif jika pengetahuan mereka ditransformasikan ke dalam dunia sosial. Basis epistemis mesti diterjemahkan dalam praksis sosial. Itu artinya mereka mesti membantu Negara dan Gereja dalam proses kemerdekaan rakyat (umat) dari berbagai ketidakadilan. Pengetahuan mereka mesti berdaya sosial. Seorang Katekis tidak hanya diukur dari seberapa kualitas kadar epistemisnya waktu ia masih kuliah, melainkan juga ditentukan dari seberapa jauh dia mengeksplorasi kehidupan sosial lalu memberikan pikiran-pikiran konstruktif berdasarkan kompetensi yang ia miliki. Eksistensinya sebagai seorang Katekis harus memiliki manfaat secara sosial dengan bertitik tolak dari pengetahuan agama yang dimilikinya. Ia mesti berada secara positif dan konstruktif.

Itu artinya dia bukan hanya *ens rationale* yang dimanifestasikan dengan pemilikan atas sejumlah pengetahuan dalam bidang kateketik, agama dan pastoral, tetapi juga merupakan *ens sociale* yang mesti terlibat aktif dalam seluruh proses dan dinamika horisontal (perpolitikan) manusia. Artinya seorang Katekis harus memiliki kepekaan sosial-politik yang bertujuan untuk mencari solusi pastoral atas berbagai situasi distortif yang selama ini melanda bangsa kita. Apa yang mereka miliki yaitu pengetahuan (kateketik, agama dan pastoral) mesti diaplikasikan ke dalam ranah sosial-politik, terutama dalam mencermati berbagai ketimpangan sosial yang disebabkan oleh adanya pragmatisme. Untuk hal ini, katekis harus yakin dan percaya diri bahwa basis pengetahuan yang telah dimilikinya pasti memiliki manfaat, bisa menentang berbagai arus yang menyebabkan demoralisasi bangsa.

Pemikir kenamaan, Pierre Bourdieu, dalam bukunya *"The Field of Cultural Production"* pernah menulis *"critical science, critical of itself and the other sciences and also critical of the powers that be"*⁸ (Sebuah ilmu pengetahuan kritis, kritis terhadap dirinya dan kritis terhadap ilmu yang lain dan juga kritis terhadap kekuasaan-kekuasaan yang ada). Jika

8 Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production* (Cambridge: Polity Press, 1993), p. 28.

pemikiran ini dikaitkan dengan para katekis, maka dapat dikatakan bahwa katekis harus menjadi insan kritis dan mesti mampu meneropong berbagai situasi sosial yang ada lalu memberikan pikiran-pikiran solutif. Pengetahuan yang dimiliki para Katekis akan lebih berguna jika dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, melainkan juga bermodalkan pengetahuan yang dimilikinya, ia berusaha untuk mengkonstruksi "habitus" berpolitik konstruktif. Ia tidak boleh bangga karena telah memiliki pengetahuan agama dan kateketik, tetapi harus berbangga jika dia telah secara aktif terlibat dalam liberalisasi sosial. Ia harus terlibat dalam diskursus-diskursus politik lalu menawarkan seperangkat langkah strategis. Demoralisasi publik mesti menjadi "tamparan" bagi Katekis untuk mencari *platform* pastoral yang benar, sesuai, kontekstual dan efektif dan salah satunya adalah terlibat dalam persoalan politis yang dalam praktiknya seringkali nir-demokratis dan nir-publik. Itu berarti tugas seorang Katekis bukan hanya kuliah, mendapatkan gelar sarjana, menjadi katekis dan guru agama serta mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mesti menjadi *agent of change* dan *social control* terhadap dinamika demokrasi. Peran seperti ini tidak dilihat sebagai tugas tambahan saja, melainkan harus dilihat sebagai imperatif pastoral yang implementasinya terlaksana secara jelas dalam perhatian penuh terhadap dunia perpolitikan. Marcus Tullius Cicero pernah mengatakan *salus populi suprema est lex* (kemaslahatan masyarakat adalah hukum tertinggi).⁹ Dalam bahasa politiknya rakyat tetapi dalam bahasa agamanya adalah umat. Keduanya berbeda secara terminologi, tetapi esensinya sama. Karena itu, seorang Katekis juga harus memperjuangkan kesejahteraan umat sebagai hukum tertinggi dan kalau kepentingan umat dicabik-cabik oleh kebijakan politis, bukankah Katekis memiliki porsi untuk merestorasinya?

Tugas dan perutusan seorang Katekis dalam dunia perpolitikan seperti ini merupakan implementasi atas apa yang digariskan oleh Konsili Vatikan II. Dalam Dekrit "Apostolicam Actuositatem" tentang Kerasulan Awam No. 19 dikatakan:

Perserikatan kerasulan amat beraneka ragam: ada yang mempunyai tujuan umum kerasulan Gereja; ada yang secara khusus bertujuan pewartaan Injil dan pengudusan; ada yang tujuannya merasuki tata dunia ini dengan

⁹ Sebagaimana dikutip oleh Al Andang L. Binawan dalam F. Budi Hardiman (Ed), *Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), p. 349

semangat Kristiani; ada pula yang secara khas memberikan kesaksian akan Kristus melalui amal belaskasihan dan cinta kasih.¹⁰

Katekis adalah seseorang yang "merasuki" tata dunia ini seperti tata politik dengan semangat Kristiani, memberikan kesaksian akan Kristus di tengah pergulatan sosial-kemasyarakatan. Mereka mesti memiliki opsi terhadap korban ketidakadilan sosial dan politik. Karena itu, seorang katekis mesti memiliki *sense of politic* dan *sense of public*. Dengan begitu, ia tidak akan diam tatkala menyaksikan kenyataan kebangkrutan sosial yang disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam dunia politik yang mengakibatkan amburadulnya kehidupan bersama. Seorang Katekis, harus melihat fenomena distorsi sosial sebagai titik pijak baginya untuk melaksanakan tugas kenabian. Itu berarti, ketika seorang katekis terjun memiliki keprihatinan sosial, saat itulah ia telah melaksanakan tugas pewartaan sebagaimana diamanatkan oleh Kristus untuk menjadi garam dan terang bagi dunia.

Dalam melaksanakan tugas ini, Katekis harus menjadikan Kristus sebagai pijakan perjuangannya. Artinya, ia berjuang bukan karena ia memiliki kepentingan parsial-pragmatis, melainkan karena itu telah menjadi tugas yang diberikan oleh Kristus. Yesus sendiri dalam hidupnya seringkali terlibat persoalan sosial masyarakat Yahudi yang seringkali buntut oleh pragmatisme para tokoh agama dan politik. Yesus tak segan-segan mengkritisi konspirasi antara para pemuka agama Yahudi dan tokoh politik Palestina yang acapkali mendiskreditkan rakyat kecil. Ia tidak segan-segan memberikan catatan kritis atas kiprah tokoh agama yang tidak menghargai sesama terutama kaum kecil. Hal seperti inilah yang harus menjadi spirit para katekis. Katekis merupakan agen (Gereja dan sosial) yang dapat terlibat entah melalui diskursus-diskursus sosial-politik, telaah-telaah pastoral maupun melalui gerakan kolektif para Katekis untuk merestorasi keadaban publik yang kian hancur berantakan. Mereka adalah *contrast society* (masyarakat alternatif) yang bisa menjadi kekuatan tandingan sekaligus sarana Allah dalam meluruskan praktik-praktik politik yang salah kaprah.

2.2.3. Dari Teologi Pastoral ke Praksis Liberatif

10 *Dokumen Konsili Vatikan II*, R. Hardawiryana (Penterj.), (Jakarta: Obor dan Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2009), p. 374.

Dalam Konsili Vatikan II, dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini (No.1) dikatakan "Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga".¹¹ Katekis merupakan murid Kristus karena mereka mengambil bagian dalam tugas Kristus untukewartakan Kerajaan Allah. Karenanya, Katekis harus melihat "duka dan kecemasan" dunia yang disebabkan oleh kebangkrutan visi moral politik sebagai "duka dan kecemasaannya" juga. Tugas pewartaan ini dipandang sebagai bentuk partisipasinya dalam mempertahankan Gereja Kristus. Gereja Kristus itu merupakan persekutuan Ekaristis yang sadar konteks. Maka pada tempat pertama kita membutuhkan kepekaan mengenai konteks dalamnya kita hidup dan bergerak, agar kita sadar seberapa jauh konteks itu mempengaruhi dan membentuk pikiran dan pandangan kita sendiri dan juga pikiran dan pandangan orang dengannya kita bertemu dan berkomunikasi.¹² Katekis, sebagai bagian dari Gereja Kristus, mesti memperhatikan konteks, salah satunya adalah konteks sosial-politik. Karena itu, seorang Katekis tidak boleh hanya puas dengan pengetahuan pastoral atau teologi pastoral. Katekis mesti mengaplikasikan teologi pastoral ke dalam pastoral pembebasan. Teologi dijalankan sebagai sebuah kritik budaya dan politik. Teologi yang melibatkan diri dalam pergulatan manusia berangkat dari tanggung jawab atas keterlibatan teologi dalam berbagai pola pikir dan tindak yang membelenggu dan memenjarakan manusia.¹³ Artinya pengetahuan pastoral yang dimilikinya mesti berdaya transformatif-liberatif dengan menjadikan Sabda Allah sebagai rujukan sekaligus norma utamanya. Sebab jika "diwartakan dalam kerangka berpikir masyarakat setempat, Firman Allah yang hidup pasti terasa lebih tajam daripada pedang bermata dua mana pun...".¹⁴

Tugas seperti ini menuntutnya untuk tidak hanya terjebak dalam

11 *Ibid*, p. 523.

12 Georg Kirchberger, "Nusa Tenggara Sebagai Locus Berteologi dan Pastoral" dalam John M. Prior dan Amatus Woi (Eds.), *Membaca Tanda Zaman Pada Akhir Sebuah Zaman* (Maumere: Puslit Candraditya, 2003), p 142 .

13 Paul Budi Kleden, *Teologi Terlibat, Politik dan Budaya dalam Terang Teologi* (Maumere: Ledalero, 2003), p. ix.

14 John M. Prior, "Kerasulan Kitab Suci Dalam Sejarah Umat Nusa Tenggara" dalam Goerg Kirchner dan Joh M. Prior (Eds.,) *Sabda Allah Denyut Jantung Misi I* (Ende: Nusa Ende, 1998), p. 25.

verbalisme, tetapi mesti terjun langsung ke dalam situasi umat untuk merasakan serta membela umat bila diterjang badai ketegangan sosial. Gereja adalah umat Allah dalam perjalanan. Gereja bukan gudang kesucian yang menyelamatkan dunia dengan memberi pengajaran serta ajaran dan dengan mengisi dunia yang jahat dengan rahmat sakramental; Gereja menyucikan dunia dengan menemukan dan menyuarakan rahmat yang sudah selalu berkarya dalam usaha orang. Dengan kata lain, Gereja menyucikan dunia, jika orang Kristen menghadapi tantangan hidup perorangan dan melibatkan diri pada pergulatan sosial-politis dalam kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan.¹⁵ Katekis sebagai aset dan agen Gereja mesti melibatkan diri dalam liberalisasi manusia dengan mengaplikasikan pengetahuan (teologi) pastoral yang telah dimilikinya ke dalam praksis liberatif. Melibatkan diri dalam pergulatan sosio-politis adalah suatu tugas niscaya karena tidak dapat disangkal lagi bahwa hal itu turut memberi pengaruh terhadap kehidupan umat beriman. Jika seorang Katekis masa bodoh terhadap hal ini, itu berarti secara tidak langsung dia membiarkan eksekusi negatif dari politik itu bertumbuh dan bersemi di tengah masyarakat. Dan jika demikian, eksistensinya menjadi nirmakna dan kontra-kemanusiaan. Pengetahuan teologi dan pastoralnya menjadi ketiadaan manfaat.

Sebagai orang Kristen yang juga adalah pengikut Kristus, Katekis diberi tugas oleh Kristus untukewartakan Firman Allah tentang cinta, persaudaraan dan kasih. Demi persekutuan cinta ini, ia mengambil bagian dalam tugas Gereja universal. Dan "Gereja dipanggil selain untuk menghidupi persekutuan, menjadi sarana atau sakramen keselamatan di tangan dunia, juga senantiasa berjuang menghantar semua orang kepada persekutuan dengan Allah".¹⁶ Di dalamnya, ia tentu akan bebenturan dengan berbagai situasi kehidupan. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi penghalang bagi Katekis untuk tetap memaklumkan Yesus. Mewartakan Yesus yang bangkit ke tengah situasi seperti itu merupakan tugas yang harus diemban oleh orang-orang Kristen termasuk Katekis. Di sini, tugas untukewartakan Yesus adalah *imperatif kategoris*. Itu berarti Katekis memiliki tugas mulia dan beban yang harus mereka tanggung di mana Kristus harus dimaklumkan kepada semua orang,

¹⁵ Kata dari Penerbit dalam Eddy Kristianto, *Sakramen Politik* (Yogyakarta: Lamahera, 1993), p.vi.

¹⁶ *Ibid.*, p.v.

kan dan dimana saja. Dalamewartakan Yesus, para Katekis dapat menggunakan berbagai cara dengan catatan hal itu akan membantu mereka untuk memaklumkan Kristus kepada slapa saja. Katekis adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang agama. Sementara agama selalu merupakan bagian dari masyarakat.¹⁷ Karenanya, seorang Katekis tidak boleh mengabaikan masyarakat. Masyarakat adalah fokus perjuangannya.

III. PENUTUP

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Katekis bukan hanya berkaitan dengan bidang kateketik dan agama, tetapi juga berpilin erat dengan situasi sosial politik. Karena itu, eksistensi seorang Katekis mesti peka terhadap situasi politik dalam apalagi jika situasi itu tidak mengakomodir kemauan rakyat. Katekis harus lebih berani lagi menunjukkan dirinya sebagai agen dan aset Gereja untuk memurnikan tata dunia yang rusak oleh keserakahan banyak pihak. Katekis tidak boleh melihat diri sebagai pembantu para Imam dalam melaksanakan tugas perutusan, melainkan sebagai agen inti yang membantu tercapainya kebaikan bersama.

Untuk bisa mencapai semua ini, Katekis harus membuat terobosan-terobosan konstruktif agar tercapainya keadaban publik sebagaimana dicitakan bersama. Katekis merupakan andalan Gereja dalam tugas pewartaan. Sebagai andalan Gereja, maka Katekis mesti kritis terhadap berbagai situasi, termasuk situasi perpolitikan. Merupakan kenyataan yang tak terbantahkan lagi bahwa perpolitikan seringkali memengaruhi kehidupan publik saat ini. Hegemoni politik acapkali mendikte dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Parahnya lagi, politik seringkali mengabaikan etika. Atas dasar itu, sudah saatnya bagi setiap orang termasuk para Katekis untuk melihat lagi politik sebagai sakramen (meminjam istilah Edy Kristyanto) yang mestinya mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan menjadikan mereka sebagai insan yang harus menjauhi segala praktik destruktif.

Keadaban publik yang akhir-akhir ini kian hancur karena berbagai ketidakadilan dalam bidang politik mesti direstorasi agar tidak lantas membenamkan bangsa ini ke jurang kehancuran yang paling dalam. Ini adalah kenyataan kontekstual. Karena itu, semua orang, termasuk para Katekis mesti

¹⁷ J. B. Banawiratma dan J. Müller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), p. 91.

mencari kiat-kiat positif untuk mencari solusi guna memecahkan persoalan yang kontekstual itu. Tetapi semua ini akan tercapai jika Katekis memiliki kepekaan dalam dunia perpolitikan. Politik tidak boleh dilihat sebagai ranah kotor yang harus dihindari, sebab politik itu pada dasarnya mulia. Politik menjadi kotor karena ulah beberapa politikus yang pragmatis, yang menjadikan politik itu sebagai sarana untuk membajak kepentingan publik. Karena itu, Katekis harus lebih berani lagi untuk terjun ke dunia perpolitikan, berani menentang ketidakadilan yang disebabkan oleh kebijakan politis yang seringkali apolitis dan berbagai kenyataan negatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Katekis>, diakses 17-03-2014

<http://stepanus-ardi.blogspot.com/2011/12/spiritualitas-seorang-katekis.html>, diakses 17-03-2014.

<http://www.penaindonesia.org/2013/paus-fransiskus-menyebut-katekis-sebagai-pilar-pendidikan-iman>, diakses 20 Maret 2013.

II. BUKU DAN DOKUMEN

Bourdieu, Pierre. *The Field of Cultural Production*. Cambridge: Polity Press, 1993.

Binawan, Al Andang L. dalam F. Budi Hardiman (Ed), *Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Banawiratma, J. B. dan J. Müller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Dokumen Konsili Vatikan II, R. Hardawiryana (Penterj.). Jakarta: Obor dan Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2009.

Kristiyanto, Eddy (Ed.). *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kopendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Ledalero, 2009.

Kirchberger, Georg. "Berbagi: Inti Iman Kristiani, Tinjauan dalam Perspektif Teologi" dalam *Berbagi* Volume 1, No 1, Januari 2012.

Kirchberger, Georg. "Nusa Tenggara Sebagai Locus Berteologi dan Pastoral" dalam Prior, John M. dan Amatus Woi (Eds.), *Membaca Tanda Zaman Pada*

Akhir Sebuah Zaman. Maumere: Puslit Candraditya, 2003.

Kleden, Paul Budi. *Teologi Terlibat, Politik dan Budaya dalam Terang Teologi*
Maumere: Ledalero, 2003.

Kristianto, Eddy. *Sakramen Politik*. Yogyakarta: Lamahera, 1983.

Prior, John M. "Kerasulan Kitab Suci Dalam Sejarah Umat Nusa Tenggara" dalam
Goerg Kircberger dan Joh M. Prior (Eds.), *Sabda Allah Denyut Jantung Misi*
I. Ende: Nusa Ende, 1998.